

BAB V

MANUSIA, NILAI, MORAL DAN HUKUM

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai, moral maupun hukum menjadi bagian penting bagi proses pembentukan karakter suatu bangsa.

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu :

1. Membedakan pengertian nilai, moral dan hukum
2. Mendeskripsikan peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan manusia
3. Menganalisis perubahan nilai, moral dan hukum dalam kehidupan
4. Menjelaskan peran nilai dalam pembentukan karakter manusia.
5. Menganalisis masalah pembentukan karakter bangsa.



Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia
(<http://dinatropika.wordpress.com>)

A. PERAN NILAI DAN NORMA DALAM MASYARAKAT

1. Kedudukan Nilai dalam Masyarakat

a. Konsep dan Hakekat Nilai

Perilaku manusia terkait dengan nilai. Bahkan nilai menjadi aspek penting yang dibutuhkan oleh manusia. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Sedangkan menurut Pepper, sebagaimana dikutip oleh Munandar, menyatakan bahwa batasan nilai dapat mengacu pada berbagai hal seperti minat, kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban agama,

kebutuhan, keamanan, keengganan dan hal-hal yang berhubungan dengan perasaan dan orientasi seleksinya (Irene, 1993:21).

Nilai mempunyai berbagai makna, sehingga sulit untuk menyimpulkan secara komprehensif makna nilai yang mewakili dari berbagai kepentingan dan berbagai sudut pandang, tetapi ada kesepakatan yang sama dari berbagai pengertian tentang nilai yakni berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya nilai itu penting. Untuk melihat sejauhmana variasi pengertian nilai tersebut, terutama yang terkait dengan pendidikan, di bawah ini ada beberapa definisi yang diharapkan berbagai sudut pandang (dalam Elly,2007:120)

1. Menurut Cheng (1955): Nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki .
2. Menurut Frakena, nilai dalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benada abstrak yang artinya “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.
3. Menurut Lasyo, nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya.
4. Menurut Arthur w.Comb, nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.
5. Menurut John Dewey , *value is object of social interest*

Sosiologi tidak berbicara tentang nilai itu sendiri, tetapi lebih menekankan sejauh mana suatu nilai akan mempengaruhi perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain (Irene, 1993:21). Menurut Prof. Dr. Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 yakni:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam yakni:

1. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal.
2. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa indah.
3. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kodrat manusia.

4. Nilai religius, yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak.

Dengan demikian, nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja, akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud benda material. Bahkan sesuatu yang bukan benda material itu dapat menjadi nilai yang sangat tinggi nilainya (Irene, 1993:21). Nilai rohani tidak dapat diukur dengan menggunakan alat-alat pengukur (misalnya: meteran, timbangan); tetapi diukur dengan “budi nurani manusia”. Oleh karena itu, sangatlah sulit dilakukan apalagi kalau perwujudan budi nurani yang universal (Irene, 1993:22). Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam segala perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam bentuk norma atau ukuran normatif, sehingga merupakan suatu perintah/keharusan, anjuran atau merupakan larangan, tidak diinginkan atau celaan. Segala sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran, keindahan, kebaikan dan sebagainya, diperintahkan/dianjurkan. Sedangkan segala sesuatu yang sebaliknya (tidak benar, tidak indah, tidak baik dan sebagainya), dilarang/tidak diinginkan atau dicela. Dari uraian di atas, jelas bahwa nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia (Irene, 1993:22).

Robert M. William (1982) memberikan perumusan yang jelas tentang adanya empat buah kualitas tentang nilai-nilai, yaitu:

1. Nilai mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan dengan hanya sekedar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Dalam hal ini nilai dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.
2. Nilai-nilai menyangkut atau penuh semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosi.
3. Nilai-nilai bukan merupakan tujuan konkrit dari suatu tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai sebagai kriteria dalam memiliki tujuan-tujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
4. Nilai-nilai mempunyai unsur penting, dan tidak dapat disepelekan bagi orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan nilai-nilai berhubungan dengan pilihan,
5. dan pilihan merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.

Dalam kajian sosiologi, yang dimaksud dengan sistem nilai adalah nilai inti (*score value*) dari masyarakat. Nilai inti ini diikuti oleh setiap individu atau kelompok yang berjumlah besar. Warga masyarakat betul-betul menjunjung tinggi nilai itu sehingga menjadi salah satu faktor penentu untuk berperilaku. Bahkan menurut William (1980),

sistem nilai itu tidak tersebar secara sembarangan, tetapi menunjukkan serangkaian hubungan yang bersifat timbal balik, yang menjelaskan adanya tata tertib di dalam suatu masyarakat.

Adanya sistem nilai budaya yang meresap dan berakar kuat di dalam jiwa masyarakat, maka akan sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat. Mungkin anda pernah mendengar pepatah “banyak anak banyak rejeki”. Sistem nilai ini begitu diyakini oleh sebagian besar masyarakat kita dulu, sehingga pelaksanaan program KB yang menginginkan keluarga kecil bahagia barulah tampak berhasil sekitar 20 tahun kemudian. Menurut Koentjoroningrat suatu sistem nilai budaya juga berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Irene, 1993:23).

Hakikat adalah unsur yang harus/wajib ada untuk adanya Sesuatu. Sulit dipahami jika tidak diberi contoh. Misalnya, apa yang membuat kita tahu bahwa benda itu adalah buku tulis? Yang paling utama adalah adanya kertas, yang kedua yaitu kertas yang terjilid dengan rapi. Nah kertas itu yang merupakan unsur utama dari sebuah buku.

Nilai cenderung bersifat tetap, tetapi yang berubah adalah penilaian oleh manusia. Oleh karena itu tidak tepat dikatakan bahwa ada pergeseran nilai karena nilai tidak pernah bergeser. Yang bergeser adalah persepsi atau penilaian manusia. Sebagai contohnya, Vincent Van Gogh adalah seorang pelukis yang dilahirkan di Zundert, sebuah kota di Belanda selatan pada tanggal 30 Maret 1853. Ia mati bunuh diri pada tanggal 28 Juli 1890. Kemiskinan dan karya seninya yang tidak diapresiasi merupakan penyebab kematiannya. Pada saat itu lukisan Van Gogh tidak memiliki arti apa pun di masyarakat, tetapi seratus tahun kemudian karyanya diagungkan, contoh lainnya untuk lukisan Affandi pelukis dari Indonesia dihargai nilai lukisannya dengan harga relatif mahal dibandingkan saat ia masih hidup. Hal tersebut sebagai contoh bahwa nilai tidak berubah tetapi cara manusia dalam menilai bisa berubah. Coba Anda renungkan dengan mengamati nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat kita.

b. Hierarki Kualitas Nilai

Nilai tidak mudah dipahami jika lepas dari konteksnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang nilai bersifat simultan saja, tetapi harus dipahami secara holistik dan kontinue, sehingga problem yang akan diatasi atau dikaji memaparkan persoalan nilai dalam berbagai dimensinya, sebagaimana dijelaskan oleh Frondizi memberikan yang melakukan pemilahan terhadap kualitas sesuatu, yaitu:

1. Kualitas primer: Suatu hal utama yang membuat kenyataan sesuatu dan sifatnya harus (misalnya: bentuk, wujud, panjang, berat, tinggi [bisa diindera/material], akal [tidak bisa diindera/immaterial])
2. Kualitas sekunder: Sesuatu yang menyertai kenyataan sesuatu (misalnya: warna, rasa, dan bau)
3. Kualitas tersier: Sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh indera (misalnya: kharisma, rasa takut, bingung, keanggunan)

Ketiga kualitas ini bersatu menjadi sesuatu yang disebut sebagai Kualitas Gestalt. Dengan penyatuan tiga kualitas tadi, sesuatu bisa dibedakan, misalnya: mana orang yang baik hati, mana gitar yang suaranya merdu, mana kasur yang enak ditiduri, dan sebagainya. Kualitas Gestalt inilah yang menjadi ciri khas setiap objek. Contoh yang lebih konkrit lagi. Apa yang merupakan Kualitas Gestalt dari manusia? Pertama-tama harus dipilah dulu kualitasnya:

- Kualitas primer: manusia memiliki akal, karsa, dan rasa
- Kualitas sekunder: manusia memiliki bentuk, dan warna sehingga bisa diindera
- Kualitas tersier: manusia memiliki kejujuran, loyalitas, dedikasi, keberanian, dan sebagainya.

c. Norma Sosial

Menurut Robert M.Z. Lawang, norma diartikan patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain; dan norma ini merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang (Irene, 1993:23).

Ada berbagai macam jenis norma sosial, yang tak selamanya mudah diperbedakan satu sama lain. Oleh karena itu usaha-usaha untuk mengadakan klasifikasi yang sistematis



Folkways : Keluarga makan bersama
(<http://www.cebuhome.net>)

amatlah sukar. Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wignyosoebroto (1989), bahwa satu di antara usaha-usaha untuk memperbedakan norma-norma sosial atas dasar jenis sanksi yang mendasari kekuatan berlakunya. Walaupun para sosiolog mengakui adanya batas yang kurang jelas dari pengklasifikasian norma-norma sosial ini, akhirnya digolongkannya

menjadi antara lain apa yang disebut “*folkways*”, “*mores*” dan “hukum”.

1) *Folkways*

Folkways diartikan dari arti kata-katanya berarti tatacara (=ways) yang lazim dikerjakan atau diikuti oleh literatur-literatur sosiologi, *folkways* dimaksudkan untuk menyebutkan seluruh norma-norma sosial yang terlahir dari adanya pola-pola tingkah pekerti yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan – di dalam hidup mereka sehari-hari yang dipandang sebagai hal yang telah terlazim. Walaupun *folkways* semula hanya merupakan kebiasaan dan kelaziman belaka (yaitu sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan ajeg di dalam realita), maka berangsur-angsur dirasakan adanya kekuatan yang bersifat standard, yang akhirnya secara normatif wajib dijalani. Misalnya praktek-praktek penggunaan tata bahasa dan perbendaharaan bahasa; berapa kali kita makan sehari; cara kita berpakaian; cara merawat dan membersihkan tubuh; cara mengucapkan salam dan lain sebagainya.

Dengan adanya *folkways* sebenarnya mempermudah tugas kita sebagai warga masyarakat, karena *folkways* sudah mempersiapkan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman (normatif) yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menentukan cara apakah yang sebaiknya dipilih atau dikerjakannya. Sebagai contohnya, pada saat anda pergi kuliah akan berpakaian sopan dan rapi, tapi saat pergi ke pantai anda pun dengan bebas memakai celana pendek dan kaos. *Folkways* yang diikuti secara terus –menerus tidak hanya mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang bersifat lahir, akan tetapi dapat juga berpengaruh pada kebiasaan-kebiasaan berpikir. Setiap warga masyarakat pada akhirnya akan berpikir untuk dapat mengetahui apa yang harus dilakukan masing-masing warga di dalam situasi-situasi tertentu. Perasaan aman dan pasti tentu akan dirasakan oleh masing-masing warga masyarakat, apabila *folkways* dipakai sebagai norma yang diterima dan dimengerti oleh warga-warga masyarakat.

Penyimpangan terhadap *folkways* tentu dapat terjadi pada masyarakat, misalnya: untuk pergi kuliah tidak lagi berpakaian sopan dan rapi, tapi memakai kaos singlet dan bersarung. Makan dengan tangan kiri dan sebagainya. Sebagai sarana pengontrol dan penentu keadaan tertib sosial, *folkways* pun memiliki sanksi-sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi-sanksi *folkways* relatif tidak berat, dan sifatnya tidak formil, seperti misalnya: berupa ejekan, sindiran, pergunjangan dan olok-olok. Namun demikian, sanksi-sanksi ini dapatlah bersifat kumulatif jika pelanggaran terhadap *folkways* dilakukan secara terus-menerus. Pada akhirnya si pelanggar akan tersisihkan dari kontak-kontak sosial (Irene, 1993:24).

Folkways biasanya berlaku pada orang di dalam batas-batas tertentu. Ancaman-ancaman terhadap sanksi pelanggaran-pelanggaran *folkways* pun hanya akan datang dari kelompok-kelompok tertentu itu saja. Oleh karena itu, sanksi-sanksi informil yang mempertahankan *folkways* seringkali tidak terbukti tidak efektif kalau ditujukan kepada orang-orang yang tidak menjadi warga penuh dari kelompok pendukung *folkways* itu. Seperti contoh di bawah:

Seorang anak kota yang berdandan “menor” di tengah-tengah desa, walaupun dipergunjingkan dengan hebat oleh orang-orang sedesa, pastilah tidak akan merasa sakit hati atau terseinggung. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak lain karena si anak kota itu secara fisik memang betul berada di desa, namun secara mental dan sosial masih menjadi orang kota.

2) *Mores*

Dibandingkan dengan norma-norma *folkways* yang biasanya dipandang kurang penting, maka *mores* dipandang lebih esensiil bagi terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, *mores* selalu dipertahankan dengan ancaman-ancaman sanksi yang jauh lebih keras. Pelanggaran terhadap *mores* selalu disesali dengan sangat, dan orang selalu berusaha dengan amat kerasnya agar tidak melanggar *mores*.

Seperti halnya dijelaskan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, kesamaan *folkways* dan *mores* terletak pada kenyataan bahwa kedua-duanya tidak jelas asal-usulnya, terjadinya tidak terencana, dasar eksistensinya tidak pernah dibantah, dan kelangsungannya, karena didukung oleh tradisi – relatif amatlah besar. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kesamaan antara *folkways* dan *mores* adalah sanksi-sanksinya bersifat informil dan komunal, berupa reaksi spontan dari kelompok-kelompok sosial di mana kaedah-kaedah tersebut hidup. Namun demikian, *mores* lebih dipandang sebagai bagian dari hakekat kebenaran, di mana sebagai norma secara moral dipandang benar.

Mores sering dirumuskan di dalam bentuk yang negatif berupa larangan keras atau sebagai hal yang dianggap tabu misalnya: larangan perkawinan antara saudara yang masih berdarah dekat. Larangan melakukan hubungan suami isteri yang tidak terikat tali perkawinan (berzina). *Mores* tidak hanya berupa larangan keras, tetapi juga mengatur perhubungan khusus antara dua orang tertentu; pada situasi tertentu; misalnya: seorang dokter dan pasien. *Mores* juga mengkaidahi secara umum sejumlah perhubungan-perhubungan sosial di dalam situasi-situasi umum. Sebagai contohnya, kita diharuskan bersikap jujur, rajin, bertanggung jawab dan sebagainya.



Dokter dan pasien
([http:// m.kompas.com](http://m.kompas.com))

Berkembangnya masyarakat yang semakin heterogen dan kompleks menjadikan *folkways* dan *mores* tidaklah cukup untuk menciptakan keadaan tertib suatu masyarakat. Pada masyarakat yang agraris dan primitif untuk menciptakan keadaan tertib cukup dengan *folkways* dan *mores* saja. Karena pada situasi tersebut hubungan antara warga masih saling kenal; jumlah warga relatif sedikit; dan jarang mengadakan kontak dengan warga dari desa lain, akibatnya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang warga dapat langsung diketahui dan mendapat perhatian. Namun demikian, adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua masyarakat dapat menegakkan ketertiban seperti cara yang dilakukan pada masyarakat yang masih terpencil dan terisolasi.

Mores memerlukan kekuatan organisasi peradilan agar pentaatannya bisa dijamin, maka segera itu bisa dipandang sebagai hukum. Sebagai hukum yang tidak tertulis dapatlah dikatakan sebagai hukum adat. Hukum tertulis merupakan perkembangan akhir dari bentuk norma-norma sosial yang bersifat formil. Badan peradilan yang bekerja dengan hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Suatu organisasi politik yang hanya mengerjakan fungsi peradilan yakni menegakkan berlakunya kaedah-kaedah tertulis mulai kewalahan bila harus mengurus berbagai ragam pelanggaran yang dilakukan banyak orang. Oleh karena itu, seiring dengan berlakunya norma hukum ini, bertambah pula fungsi organisasi politik yang membantu menegakkan hukum dalam menciptakan ketertiban masyarakat, seperti munculnya fungsi kepolisian.

Walaupun hukum senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat; seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata, hukum perkawinan dan sebagainya; anda perlu ketahui juga bahwa *mores* dan *folkways* masih tetap efektif juga. Karena hukum biasanya dijiwai oleh semangat dan jiwa *mores* yang lama, yang mungkin sudah terangkat sebagai hukum tak tertulis atau pun hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hasil suatu perencanaan dan pikiran-pikiran yang sadar. Fungsi hukum tertulis memberikan pelafalan-pelafalan yang lebih tepat dan tegas yang pelaksanaannya mempunyai kekuatan-kekuatan formal.

TUGAS INDIVIDUAL
“Bepikir Kritis dan Kreatif”

1. Coba amati kehidupan di sekitar Anda , jelaskan 3 bentuk perubahan kebiasaan /perilaku !
2. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan perilaku tersebut !
3. Pikirkan ide kreatif Anda , agar perubahan perilaku tersebut tidak merugikan kehidupan masyarakat !

B. PERAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari tempat dan waktu dimana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu pengertian hukum sangat beragam. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang hukum, sebagai berikut (Sunarso, 2006: 93-94)

- a. Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja, dan Dr. B. Arief Sidharta, SH.menyatakan bahwa hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.
- b. Dr. E. Utrecht, SH,menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
- c. Menurut Simorangkir, SH, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.
- d. Menurut Mudjiono, SH, Hukum adalah keseluruhan aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, baik tertulis dan tidak tertulis yang berfungsi memberikan rasa tentram dan akan berakibat diberikannya sanksi bagi yang melanggarnya.

Pengertian hukum dapat pula dikaji dari berbagai pendapat. Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- Hukum sebagai ilmu, ilmu hukum adalah cabang dari ilmu sosial dan humaniora.
- Hukum sebagai disiplin, pelanggaran terhadap disiplin akan diberi sanksi.
- Hukum sebagai kaedah, yaitu pedoman untuk bertindak.
- Hukum sebagai tata hukum, yaitu kaedah-kaedah yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.

- Hukum sebagai petugas, menunjuk kepada orang yang diberi tugas menegakkan hukum.
- Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Hukum ialah peraturan-peraturan yang *bersifat memaksa*, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Plato mengartikan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.



DPR : Salah satu penentu kebijakan hukum di Indonesia
(<http://foto.vivanews.com>)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam hukum meliputi: a) peraturan dibuat oleh yang berwenang; b) tujuannya mengatur tata; c) tertib kehidupan masyarakat; d) mempunyai ciri memerintah dan melarang; e) bersifat memaksa dan ditaati

Dalam kehidupan sosial orang akan mentaati hukum karena dinilai memberikan ketentraman dan ketertiban, serta tidak ingin mendapatkan sanksi ketika orang tidak lagi mematuhi aturan yang berlaku. Di samping itu, masyarakat menghendaknya adanya hukum. Dalam hal ini, banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada. Faktor lainnya, adanya paksaan Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum. Dalam konteks inilah, hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum

Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan. Adapun fungsi hukum adalah :

- Dua fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada didalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan olehnya. Hukum hanya mempertahankan apa yang telah diterapkan dan diterima di dalam masyarakat.
- Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat, maka hukum bertugas untuk mengerakkan tingkah laku masyarakat kearah timbulnya suatu keadaan tertentu yang dikehendaki atau di rencanakan.

Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketereiban tersebut harus ada kepastian. Karena itu hukum harus mengatur hal yang jelas, baik subyek, obyek, wilayah berlakunya. Bentuk hukum harus jelas , apakah bentuknya tertulis ataukah tidak tertulis.

3. Jenis-Jenis Hukum

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dapat dikaji dari jenis-jenis hukumnya, secara garis besarnya jenis hukum dapat dibedakan berdasarkan :

| DASAR | DESKRIPSI |
|-----------------|--|
| WAKTU | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ius Constitutum</i>, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku didalam masyarakat Negara pada suatu saat. <i>Ius Constitutum</i> disebut pula hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini. • <i>Ius Constituendum</i>, yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup Negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang dan ketentuan lain. |
| BENTUK | <ul style="list-style-type: none"> • Hukum tertulis, yaitu hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikondisifkan (disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang) maupun tidak dikondisifkan (yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri). Hukum tertulis ini contohnya adalah Undang-undang. • Hukum tidak tertulis, merupakan persamaan dari hukum kebiasaan, atau hukum adat. Hukum tidak tertulis ini merupakan bentuk hukum yang tertua. |
| LUAS BERLAKUNYA | <ul style="list-style-type: none"> • Hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Contohnya: aturan mengenai sewa-menyewa, hukum pidana. Hukum umum sering dinamakan <i>ius generale</i>. • Hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk aturan khusus. Khususannya dapat menunjuk pada tempat maupun hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat. Contohnya: aturan |

| | |
|--------|--|
| | mengenai sewa-menyewa rumah, hukum pidana militer. Hukum khusus dinamakan juga <i>ius speciale</i> . |
| ISI | <ul style="list-style-type: none"> • Hukum public, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan public atau kepentingan umum. Mengatur hubungan hukum antara Negara dan perseorangan atau alat perlengkapan Negara. Contohnya: hukum pidana, hukum tata Negara. • Hukum privat, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya : hukum perdata. |
| FUNGSI | <ul style="list-style-type: none"> • Hukum materiil, yaitu aturan hukum yang berwujud perinnntah-perintah ataupun larangan-larangan. Contohnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha Negara dan sebagainya. • Hukum formal, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materiil. Contohnya: hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha Negara. |
| SIFAT | <ul style="list-style-type: none"> • Hukum pemaksa (<i>dwingendrecht</i>), yaitu aturan hukum yang dalam diadakan konkrit tidak dapat dikesampingkan dengan aturan yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Hukum pemaksa ini mempunyai sifat keharusan untuk ditaati. Contohnya: pasal 6 ayat (1) undsng-undsng Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan), menyatakan bahwa perkawinan harus diadakan atas kedua persetujuan calon mempelai. • Hukum pelengkap (<i>aanvullendrecht</i>), yaitu aturan yang dalam keadaan konkrit dapat dilesampingkan oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Hukum pelengkap ini dapat digunakan bila para pihak memerlukan dan apabila tidak, dapat menggunakan aturan yang dibuat sendiri. Contohnya: Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang Perikatan, semua aturan perikatan ini dapat digunakan apabila para pihak yang mengadakan perikatan tidak membuat aturan sendiri tentang perikatan yang dibuatnya. |
| SUMBER | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang, yaitu setiap aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang, serta berlaku bagi semua orang dalam wilayah Negara. • Yurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang digunakan berulang-ulang sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa. • Traktat atau perjanjian internasional, yaitu persetujuan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain dimana Negara-negara tersebut telah mengikatkan dirinya untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu. • Kebiasaan, yaitu pola tindak yang berulang-ulang mengenai suatu hal yang sama yan terjadi dalam masyarakat dalam bidang |

| | |
|--|---|
| | <p>tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin, yaitu pendapat yang dikemukakan para sarjana terkemuka mengenai suatu yang membantu setiap orang termasuk hakim dalam mengambil keputusan sebagai sumber tambahan. |
|--|---|

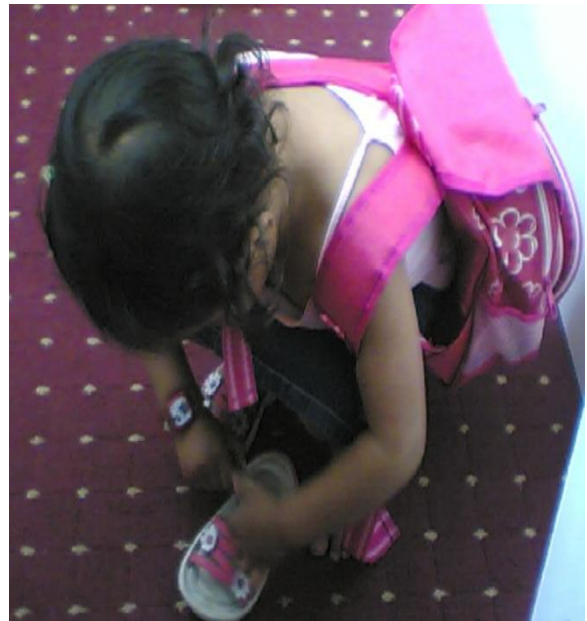
Sumber : buku *Pendidikan Kewarganegaraan*, Sunarso dkk, UNY Press, hal 93-04,2006

C. PERAN MORAL DALAM MASYARAKAT

1. Pengertian Moral

Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. Untuk memulai membahas hal ini kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang istilah “moral” . Moral memiliki makna ganda. Makna yang pertama adalah seluruh kaidah. Dan makna yang kedua adalah nilai yang berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan baik manusia.

Banyak perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik atau buruk, tetapi tidak semua. Ada juga perbuatan yang netral dari segi etis. Bila pagi hari saya mengenakan lebih dulu sepatu kanan dan baru kemudian sepatu kiri, perbuatan itu tidak mempunyai hubungan dengan baik atau buruk. Boleh saja sebaliknya: sepatu kiri dulu dan kemudian sepatu kanan. Mungkin cara yang pertama sudah menjadi kebiasaan saya. Mungkin cara itu lebih baik dari sudut pandang efisiensi atau lebih baik karena cocok dengan motorik saya, tetapi cara pertama atau cara kedua tidak lebih baik atau buruk dari sudut pandang moral. Perbuatan itu boleh disebut “amoral”, dalam arti seperti



Kebiasaan memakai sepatu
([http:// aimeecitra.blogspot.com](http://aimeecitra.blogspot.com))

sudah dijelaskan: tidak mempunyai relevansi etis. Baik dan buruk dalam arti etis seperti dimaksudkan dalam contoh terakhir ini memainkan peran dalam hidup setiap manusia. Moralitas merupakan suatu dimensi nyata dalam hidup setiap manusia, baik pada tahap perorangan maupun pada tahap sosial.

Metode Kohlberg adalah sebagai berikut. Mengemukakan sejumlah dilemma khayalan kepada subyek-subyek penelitian. "Khayalan" dalam arti: kasus-kasus itu tidak terjadi secara konkret, tapi pada prinsipnya bias terjadi. Dengan cara ini Kohlberg ingin mendapat jawaban atas dua pertanyaan: bagaimana anak-anak memecahkan dilemmamoral itu dan alas an-alasan apa dikemukakan untuk membenarkan pemecahan itu. Pertanyaan pertama menyangkut *struktur* atau *bentuknya*. Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan moral seorang anak berlangsung menurut 6 tahap atau fase.(Bertens,1993:80). Tingkat dan tahap pertumbuhan secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

| TINGKAT PERTUMBUHAN | TAHAP PERTUMBUHAN | PERASAAN |
|---|---|--|
| TINGKAT PRAAMORAL. 0-6 Tahun | TAHAP 0 Perbedaan antara baik atau buruk belum didasarkan atas kewibawaan atau norma-norma | |
| TINGKAT PRAKONVENSIONAL perhatian khusus untuk akibat perbuatan: hukuman, ganjaran, motif-motif lahiriah dan partikular | TAHAP 1 Anak berpegang pada kepatuhan dan hukuman. Takut untuk kekuasaan dan berusaha menghindari hukuman TAHAP 2 Anak mendasarkan diri atas egoisme naif yang kadang-kadang ditandai reaksi timbale balik: <i>do ut des</i> | Takut untuk akibat-akibat negative dari perbuatan |
| TINGKAT KONVENSIONAL Perhatian juga untuk maksud perbuatan: memenuhi harapan, mempertahankan ketertiban | TAHAP 3 orang berpegang pada keinginan dan persetujuan dari orang lain TAHAP 4 orang berpegang pada ketertiban moral dengan aturannya sendiri | Rasa bersalah orang lain bila tidak mengikuti tuntutan-tuntutan lahiriah |
| TINGKAT PASAKONVENSIONAL atau TINGKAT BERPRINSIP | TAHAP 5 orang berpegang pada persetujuan demokratis, kontrak-sosial, consensus bebas | Penyesalan atau penghukuman diri karena tidak mengikuti pengertian moral |

| | | |
|---|--|---------|
| Hidup moral adalah tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip batin: maksud dan akibat-akibat tidak diabaikan, motif-motif batin dan universal | TAHAP 6 Orang berpegang pada hati nurani ruhani pribadi, yang ditandai oleh keniscayaan dan universalitas | sendiri |
|---|--|---------|

Sumber : buku *Etika*, K, Bertens , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h:75-85, 1993

D. DINAMIKA PENERAPAN NILAI MORAL

1. Obyektivisme Vs Subyektivine

Penerapan maupun penanaman nilai moral tidak mudah dilakukan karena pemahaman tentang nilai cenderung tidak bisa sama antar individu, bahkan interpretasi terhadap nilai juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Aspek penting yang terkait dengan nilai adalah adanya obyektivisme dan subyektivisme yang melekat dalam nilai. Obyektivisme: *merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan nilai mendahului penilaian oleh karenanya validitas nilai tidak tergantung pada subjek yang menilai.* Dengan pengertian inilah, maka spesifikasi nilai menurut obyektivisme :

1. Nilai bersifat tetap, mutlak, dan tak terubahkan
2. Nilai bukanlah penilaian, melainkan punya posisi sendiri secara objektif

Ada pun masalah yang dihadapi oleh obyektivisme. *Pertama*, mengalami kesulitan ketika orang **harus memilih satu** dari dua atau lebih dari dua **hal yang objektif** contohnya: Anda punya satu penawar racun. Anda dan teman anda keracunan, anda akan bingung karena anda memiliki prinsip harus menolong dan bertahan hidup. Anda harus mengorbankan salah satunya, obyektivisme tidak mengijinkan hal ini. Oleh sebab itu dalam hal yang **darurat** obyektivisme mengalami kelemahan. *Kedua*, dengan nilai memiliki posisinya sendiri maka nilai dilepaskan dari pengembannya, padahal identifikasi membutuhkan pengembangan. *Ketiga*, menghilangkan relasi subjek-objek jadi seolah-olah subjek tidak berguna di sini, pertanyaan “bagaimana saya bisa membedakan budi dan ani apabila tidak ada relasi antara subjek-objek?” dapat mewakili dari kelemahan yang ketiga ini.

Subyektivisme: *merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa keberadaan nilai tergantung pada kesadaran yang menilai oleh karenanya nilai sama dengan penilaian. Sesuatu itu bernilai karena ada subjek yang menilai.* Dengan pengertian inilah, atas, maka spesifikasi nilai menurut subyektivisme :

1. Nilai bersifat relatif

2. Bersifat relatif dikarenakan nilai adalah penilaian, penilaian itu dilakukan oleh setiap orang dan setiap orang memiliki penilaian yang berbeda

Masalah yang dihadapi subjektivisme juga tidak kalah menariknya dengan masalah objektivisme. *Pertama*, dikarenakan nilai bersifat relatif maka tidak ada pedoman universal yang harus dijunjung, tidak ada peraturan toh semuanya relatif, oleh karena hal ini maka subjektivisme bisa mengacaukan segala sesuatu. *Kedua*, subjektivisme bersikap netral terhadap pertanyaan seperti ini “apakah saya harus menolong orang lain?” dan “apakah saya harus menghormati orang tua?” Menurut subjektivisme, bisa dijawab “iya” mau pun “tidak” karena berdasar atas penilaian subjek saja. Misalnya subjek adalah seorang yang sudah mapan, dia bisa saja berkata “mengapa saya harus menghormati orang tua? Padahal saya yang membiayai mereka saat ini!”.

Dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut, pembinaan tentang nilai dapat menimbulkan perbedaan pada dinamika norma dan perilaku masyarakat. Sebagai konsekuensinya, dalam kehidupan masyarakatpun konflik nilai terus terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat.

2. Perbedaan antara Kesopanan dan Moral

Kedua kaidah tersebut memiliki kesamaan yaitu sama – sama diarahkan pada perbuatan manusia, bersifat intersubjektif, dan berkenaan tentang hubungan sesama manusia. Perbedaannya adalah Kaidah Moral adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia, tidak hanya itu. Kaidah moral juga memberikan struktur dalam masyarakat. Bagaimana manusia berbuat baik atau buruk dan setiap orang akan mengenal kaidah dasar tersebut yaitu kaidah moral. Dan kaidah moral adalah kaidah yang terpenting dari kaidah – kaidah yang lain. Sementara itu, kaidah kesopanan tumbuh dari kebiasaan yang berkaitan dengan kemudahan, kepantasan dan bentuk – bentuk dalam pergaulan. Misalnya kaidah busana. Kaidah ini akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan jaman.

DISKUSI KELOMPOK “Problem-Solving”

1. Berikan contoh minimal 2 contoh tentang pelanggaran hukum di Indonesia !
2. Jelaskan dengan diagram “mengapa-mengapa” tentang sebab pokok terjadinya masalah tersebut !
3. Dengan diagram “bagaimana-bagaimana” , jelaskan solusi Anda untuk mengatasi masalah tersebut !

E. PERAN NILAI DALAM PEMEBENTUKAN KARAKTER

1. Pengertian Karakter.

Karakter adalah *'distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group'* (2). Kamus Besar Bahasa Indonesia belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata 'watak' yang diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat. Dalam risalah ini, dipakai pengertian yang pertama, dalam arti bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang punya kualitas moral (tertentu) yang positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan negatif atau yang buruk (Raka, 2007:5).

Karakter merupakan "keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak . Lebih lanjut dijelaskan Diana memetakan dua aspek penting dalam diri individu, yaitu kesatuan (cara bertindak yang koheren) dan stabilitas (kesatuan berkesinambungan dalam kurun waktu), karena itu ada proses strukturisasi psikologis dalam diri individu yang secara kodrati sifatnya reaktif terhadap lingkungan. Beberapa kriteria seperti halnya: stabilitas pola perilaku; kesinambungan dalam waktu; koherensi cara berpikir dalam bertindak . Hal tersebut telah menarik perhatian serius para pendidik dan pedagogis untuk memikirkan dalam kerangka proses pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu. Dinamika ini membuat pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur-unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses formasi setiap individu. Jadi, karakter merupakan sebuah kondisi dinamis struktur antropologis individu yang tidak hanya sekedar berhenti atas determinasi kodratinya, melainkan sebuah usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi determinasi alam dalam dirinya semakin proses penyempurnaan dirinya (Koesoema, 2004:104).

Pendidikan untuk pembangunan karakter pada dasarnya mencakup pengembangan substansi, proses dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik

dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini timbul dan berkembang dengan didasari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan, dan sikap orang yang bersangkutan. Dengan demikian, karakter bersifat *inside-out*, dalam arti bahwa perilaku yang berkembang menjadi kebiasaan baik ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam, bukan karena adanya paksaan dari luar (Raka,2007:6).

Proses pembangunan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor khas yang ada pada orang yang bersangkutan yang sering juga disebut faktor bawaan (*nature*) dan lingkungan (*nurture*) di mana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Namun demikian, perlu diingat bahwa faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat untuk mempengaruhinya. Hal yang berada dalam pengaruh kita, sebagai individu maupun bagian dari masyarakat, adalah faktor lingkungan. Jadi, dalam usaha pengembangan atau pembangunan karakter pada tataran individu dan masyarakat, fokus perhatian kita adalah pada faktor yang bisa kita pengaruhi atau lingkungan, yaitu pada pembentukan lingkungan. Dalam pembentukan lingkungan inilah peran lingkungan pendidikan menjadi sangat penting, bahkan sangat sentral, karena pada dasarnya karakter adalah kualitas pribadi seseorang yang terbentuk melalui proses belajar, baik belajar secara formal maupun informal (Raka,2007:7).

Masalah yang dihadapi dalam mengembangkan karakter adalah kemampuan untuk tetap menjaga identitas permanen dalam diri manusia yaitu semakin menjadi sempurna dalam proses penyempurnaan dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, karakter bukanlah kekuasaan hidup. Karakter dengan demikian tidak dapat dimaknai sekedar sebagai keinginan untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, kesenangan dll. Yang lebih merupakan perpanjangan kebutuhan psikologis manusia. Karakter merupakan ciri dasar melalui mana pribadi itu terarah ke depan dalam membentuk dirinya secara penuh sebagai manusia apapun pengalaman psikologi yang dimilikinya. Dalam hal ini, pengembangan karakter merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus, karakter bukan kenyataan melainkan keutuhan perilaku. Karakter bukanlah hasil atau produk melainkan usaha hidup. Usaha ini akan semakin efektif, ketika manusia melakukan apa yang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh individu (Koesoema,2004:103)

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendidikan karakter tidak mudah untuk dibangun pada setiap individu maupun kelompok, karena dalam prosesnya banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam membentuk manusia karakter. Kekuatan dalam proses pembentukan karakter

sangat ditentukan oleh realitas sosial yang bersifat subyektif yang dimiliki oleh individu dan realitas obyektif di luar individu yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pribadi yang berkarakter.

2. Prinsip Untuk Membangun Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter harus dikembangkan secara holistik sehingga hasilnya akan lebih optimal. Karena dalam membangun manusia yang berkarakter bukan hanya dari dimensi kognitif saja, tetapi dalam prosesnya harus mampu mengembangkan potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dirancang secara sistemik dan holistik agar hasilnya lebih optimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Tom Linkona, bahwa untuk mengembangkan pendidikan karakter perlu memperhatikan sebelas prinsip agar efektif yakni (2004:53-54):

1. *Character education in holds, as a starting philosophical principle, that there are widely shared pivotally important, core, ethical values, such as caring, honesty, fairness, responsibility, and respect for self and other.*
2. *Character must be comprehensively defined to include thinking feeling, and behaviour.*
3. *Effective character education requires an intentional, proactive, and comprehensive approach that promotes the core values in all phases of life.*
4. *The program environment must be a carrying community.*
5. *To develop character children need opportunity for moral action.*
6. *Effective character education include a meaningful and challenging curriculum that respects all learners and helps them succeed.*
7. *Character education should strive to develop intrinsic motivation.*
8. *Staff must become a learning and moral community in which all share responsibility for character education and attempt to adhere to same core values that guide children.*
9. *Character education require moral leadership.*
10. *Program must be recruit parent and community member as full partners.*
11. *Evaluation of character education should assess the program, the staff's functioning as character education and the extent to which are program is effective children.*



Semangat belajar tidak pandang usia
([http:// ittelkom.ac.id](http://ittelkom.ac.id))

Di samping prinsip-prinsip di atas bahwa proses pendidikan karakter tidak hanya untuk sebuah idealisme saja, tetapi pendidikan karakter memiliki makna dalam membangun kesejahteraan hidup masyarakat. Sebab itu, pembangunan karakter pada tataran individu dan tataran masyarakat luas perlu bersifat kontekstual. Artinya, untuk Indonesia, perlu

dirumuskan karakter apa saja yang perlu dikuatkan agar bangsa Indonesia lebih mampu secepat mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Paterson dan Seligman, mengidentifikasi 24 jenis karakter yang baik atau kuat (*character strength*). Sementara peringkat karakter CEO IDEAL mengembangkan beberapa karakter yang menjadi pilihan untuk dibudayakan antara lain adalah : *honest, forward looking, competent, inspiring, intelligent, fair-minded, broad minded, supportive, straightfoward, dependable, cooperative, determined, imaginative, ambitious, courageous, caring, mature, loyal, self-controlled, independent* (Zuchdi,2009:44).

Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Gede Raka dari berbagai jenis karakter, untuk Indonesia ada lima jenis karakter yang sangat penting dan sangat mendesak dibangun dan dikuatkan sekarang ini, yaitu: **kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebhinnekaan, semangat belajar, dan semangat kerja**. Karakter ini sangat diperlukan sebagai modal dasar untuk memecahkan masalah besar yang menjadi akar dari kemunduran bangsa Indonesia selama ini, yaitu korupsi, konflik horizontal yang berkepanjangan, perasaan sebagai bangsa kelas dua, semangat kerja dan semangat belajar yang rendah (Raka,2007). Diantara kelima jenis karakter tersebut kejujuran sebagai salah satu karakter yang sangat penting, tetapi justru mulai melemah dalam kehidupan individu dan masyarakat kita. Padahal, dalam manajemen kejujuran sangat berharga sekali, Nilai ini dianggap sangat penting dalam berbagai hal dan segala segmen dalam kehidupan. Nilai ini juga dijadikan salah satu hal kunci sukses seseorang, bahkan selevel CEO sekalipun nilai ini dianggap yang paling penting. Jika kita melihat formulasi *Stephen Covey* dalam buku *Speed of Trust* tentang Hasil kerja , dia merumuskan bahwa *Result* (R1) adalah *Initiave* (I) dikalikan *Execution* (E) ($R1 = I \times E$), jika komponen ini kemudian ditambahkan nilai kejujuran maka proses eksekusi atau pelaksanaan semakin cepat dalam hal ini formula menjadi $R1 = I \times E \times T$ (*Trust*)). Nilai kejujuran merupakan nilai fundamental yang diakui oleh semua orang sebagai tolak ukur kebaikan seseorang dalam kehidupan sehari – harinya , bagaimanapun pintarnya , bagaimanapun berwibawa dan bijaksananya seseorang jika dia tidak jujur pada akhirnya tidak akan diakui orang sebagai pemimpin yang baik atau bahkan di cap menjadi manusia yang tidak baik. Untuk itu marilah kita menjadikan nilai kejujuran menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan . Lebih lanjut, dalam *Learn – Action and Success (TY)* (Yasa,2009).

Menghargai kebhinnekaan adalah sikap positif yang harus dibangun dalam diri semua warga Indonesia. Perbedaan bukan sumber konflik tetapi sebagai bagian

kekayaan modal budaya yang seharusnya dapat dikelola sebagai potensi bagi pengembangan karakter bangsa yang berbudaya. Sikap saling menghargai dan menghormati harus dibangun sejak usia dini. Pendidikan berbasis budaya harus mulai digalakan kembali dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Negara harus memperhatikan potensi budaya sebagai sumber kekuatan untuk membangun identitas sosial di tengah percuturan dan kekuatan budaya global.

Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memungkinkan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan/situasi yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri, alias “sakti”. Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut dimana ia merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu dan percaya bahwa dia bisa – karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap diri sendiri. Beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional, diantaranya adalah (Widoyoko,2009:1-2): a) Percaya akan kompetensi/kemampuan diri, hingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, atau pun rasa hormat orang lain; b) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok; c) Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain – berani menjadi diri sendiri; d) Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosinya stabil); e) Memiliki internal *locus of control* (memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung/mengharapkan bantuan orang lain; f) Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya; g) Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi.

Membangun semangat belajar tidak mudah karena banyak faktor yang menurunkan motivasi belajar. Oleh karena itu, pendidikan perlu untuk memotivasi semangat belajar dengan cara (Sukmana,2008:2) misalnya : memberi motivasi; menjelaskan tujuan belajar; menjelaskan manfaat belajar dan memberi kesempatan belajar; menciptakan suasana bersaing; mencukupi sarana belajar; memberi contoh dan memberikan hadiah dan memberi hadiah . Dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat perlu dibangun sebuah komunitas manusia pembelajar yang selalu termotivasi untuk menjadikan belajar sebagai bagian dari dinamika kehidupannya

yang tak pernah berhenti. “*Long life education*” perlu dibangun dalam pikiran semua orang Indonesia yang sudah tentu harus didukung oleh negara dengan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk benar-benar dapat belajar sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Semangat belajar tidak cukup sebagai “slogan”, tetapi yang terpenting adalah dibangun “*conditioning*” bagi semua orang untuk senang dan bersemangat untuk belajar.

Semangat bekerja menjadi modal penting bagi pembangunan perekonomian bangsa ini. Melalui etos kerja dapat dibangun sebuah “spirit” untuk mengembangkan dinamika ekonomi melalui berbagai cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam persaingan industri dunia. Bangsa Indonesia sudah waktunya menanamkan etos kerja melalui “spirit kewirausahaan” sehingga setiap orang mempunyai peran untuk berkreasi dan berusaha kreatif dalam memperbaiki perekonomian yang semakin melemah dalam persaingan global.

Sosialisasi ke lima jenis karakter ini hendaknya menjadi tema pembangunan pada tataran nasional dan tidak hanya pada tataran individual saja . Oleh karena itu penerapan pendidikan karakter bersifat holistik dan kontekstual pada masing-masing tataran kehidupan harus disosialisasikan. Hal ini sependapat dengan pemikiran Gede Raka bahwa dalam seluruh substansi, proses, dan iklim pendidikan di Indonesia, secara langsung atau tidak langsung hendaknya menyampaikan peran yang jelas kepada setiap warga Indonesia, apapun latar belakang suku, agama, ras dan golongan mereka, bahwa tidak ada bangsa Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat di masa depan tanpa kemampuan untuk bersatu dan maju bersama dalam kebhinekaan, tanpa kejujuran, tanpa kepercayaan diri, tanpa belajar dan tanpa kerja keras. Lebih khusus, lagi lima karakter yang paling dasar yang dibutuhkan untuk menghela kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia yakni (Raka, 2007) :

1. Membangun dan menguatkan kesadaran mengenai akan habisnya dan rusaknya sumber daya alam di Indoneia.
2. Membangun dan menguatkan kesadaran serta keyakinan bahwa tidak ada keberhasilan sejati di luar kebijakan.
3. Membangun kesadaran dan keyakinan bahwa kebhinekaan sebagai hal yang kodrati dan sumber kemajuan.
4. Membangun kesadaran dan menguatkan keyakinan bahwa tidak ada martabat yang dapat dibangun dengan menadahkan tangan.
5. Menumbuhkan kebanggaan berkontribusi.

Kelima modal diatas sudah saatnya menjadi “spirit” bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi yang telah membawa pada kelemahan dan kehancuran tatanan nilai , sehingga terbangun kembali semangat juang dan nasionalisme baru yang sangat dibutuhkan untuk bangun dari keterpurukan. Saat ini, tidak cukup dengan modal ekonomi yang selalu diperjuangkan oleh negara untuk tetap dapat bertahan dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, tetapi yang lebih utama adalah menguatkan modal sosial, modal budaya dan modal intelektual, bahkan modal maya yang akan menguatkan kekuatan modal ekonomi bangsa ini. Saat ini kehidupan kesejahteraan rakyat masih jauh dari standar kehidupan masyarakat modern, oleh karenanya sudah saatnya bangsa ini mencermati kembali kekuatan nilai-nilai kehidupan yang cenderung materialistik, ke arah pengembangan nilai-nilai kehidupan yang lebih bermakna.

TUGAS INDIVIDUAL
“ Berpikir Kritis dan Kreatif”

1. Jelaskan nilai-nilai karakter yang sudah Anda miliki?
2. Jelaskan sikap dan kebiasaan baik yang ingin Anda kembangkan secara kreatif ?
3. Jelaskan sikap dan kebiasaan yang ingin Anda tinggalkan!?
4. Jelaskan problem personal, sosial, akademik yang masih Anda hadapi sampai saat ini?

3. Penyebab Krisis Karakter di Indonesia

Mengurai persoalan krisis karakter bukanlah pekerjaan yang mudah, karena penyebab krisis Indonesia sudah bersifat struktural dalam dinamika kehidupan masyarakat. Ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu krisis karakter yang terus berkelanjutan hingga kini sebagaimana dipaparkan oleh Gede Raka (2007:4-6) , antara lain:

a. Terlenu oleh Sumber Daya Alam yang Melimpah

Di setiap pikiran orang Indonesia sejak puluhan tahun ditanamkan pandangan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya. Sumber daya alamnya melimpah. Hal ini dijadikan salah satu unsur kebanggaan bangsa kita. Memang memiliki sumber daya alam melimpah perlu disyukuri, namun dipihak lain hal itu juga bisa membawa permasalahan. Masalah pertama, merasa bahwa persediaan sumberdaya alam identik dengan kekayaan. Padahal untuk mengubahnya menjadi kekayaan sumber daya alam ini harus diolah melalui proses yang memerlukan kecerdasan manusia. Artinya: tanpa diintervensi kecerdasan manusia sumber

daya tetap tidak mempunyai nilai atau nilainya sangat rendah, bahkan bisa menjadi sumber malapetaka.

b. Pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik

Walaupun tidak dinyatakan secara resmi, namun seara tersirat sangat jelas bahwa pembangunan ekonomi selama tiga dekade pada jaman pemerintahan Presiden Suharto adalah pembangunan yang bertumpu pada modal fisik. Ukuran keberhasilan pembangunan yang kita banggakan pun sebagian besar lebih bersifat fisik. Inilah penyebab utama mengapa selama periode tersebut kita mengabaikan pengembangan modal yang bukan bersifat fisik, atau modal yang nirwujud atau modal maya, seperti tingkat kecerdasan bangsa, pembangunan karakter bangsa, yang justru menjadi tumpuan utama kemajuan ekonomi bangsa-bangsa lain di dunia.

c. Surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme “overdoses”

Kecenderungan yang terlalu mengedepankan keberhasilan ekonomi (jangka pendek) telah membuat sebagian dari masyarakat terperangkap dalam pragmatisme yang *overdoses*, dan kemudian terjebak dalam sikap atau perilaku ‘tujuan menghalalkan segala cara’. Idealisme saat itu tidak penting, bahkan sering menjadi bahan cemoohan. Ini adalah era di mana banyak orang percaya bahwa orang jujur tidak bisa maju secara ekonomik.

d. Kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri

Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita, untuk mencapai kemerdekaan ada perubahan cara berjuang dari berjuang dengan mengandalkan kekuatan atau modal fisik menjadi berjuang dengan mengandalkan kekuatan atau modal maya. Beberapa pahlawan nasional kita, seperti Pattimura, Diponegoro, Teuku Umar, mengangkat senjata, mengobarkan peperangan untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang gagah berani yang tidak takut mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah cita-cita luhur.

Namun demikian, mereka belum berhasil mengalahkan lewat kekuatan senjata.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab krisis karakter bersifat multidimensional, sehingga solusi terhadap masalah krisis karakter harus diatasi secara terpadu. Dalam hal ini peran pendidikan diharapkan menjadi salah kekuatan yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan karakter. Pendidikan harus menjadi “*the power in building character*” dalam era globalisasi yang membutuhkan kekuatan adaptip bagi masyarakat terhadap perubahan. Kekuatan adaptasi harus dibangun pada pada proses

pendidikan karakter dengan mengembangkan energi pembelajaran secara optimal . Energi dasar ini perlu dienergikan untuk pengembangan potensi secara optimal peserta didik maupun masyarakat dalam rangka pembentukan karakter anak didik.

4. Pendidikan Karakter Secara Holistik dan Kontesktual

Sebagaimana telah dipaparkasebelumnya , bahwa masalah krisis karakter sudah bersifat struktural, maka pendidikan karakter harus dilakukan secara holistik dan kontekstual. Secara holistik artinya membangun karakter bangsa Indonesia dimulai dari keluarga, masyarakat dan negara. Model ini adalah sebuah usaha untuk melakukan pendidikan karakter secara holistik yang melibatkan aspek “*knowledge, felling, loving, dan acting*” (Ratna,2005:2) . Sedangkan aspek kontekstual terkait dengan nilai-nilai pokok yang diperlukan untuk membentuk kekuatan karakter bangsa mulai diinternalisasikan pada semua tataran nasyarakat. Dengan pendekatan yang komprehenaif diharapkan dapat menghasilkan perilaku orang yang berkarakter. Sebagainaba dijelaskan oleh Thomas Lickona (1991) mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral, yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang bak, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain serta karakter mulia lainnya. Seperti yang diungkapkan Aristoteles bahwa karakteristik itu erat kaitannya dengan *habit* atau kebiasaan yang dilakukan secara terus - menerus. Jadi konsep yang dibangun dari model ini adalah *habit of the mind, habit of the heart dan habit of the hands* (Ratna,2005:1)

➤ Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada eksistensinya. Setiap keluarga mensosialisasi anak-anaknya sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya di mana mereka hidup, akan tetapi keluarga itu sendiri mencerminkan *subcultures* tersendiri dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini berhubungan dengan keadaan geografis, kedudukan sosial, etnis, agama dari masing-masing keluarga yang tidak selalu sama. Ciri utama dari sebuah keluarga ialah bahwa fungsi utamanya yang dapat dipisah-pisahkan (Goode, 1983). Fungsi keluarga antara lain (Munandar, 1989):

- a. Pengaturan seksual
- b. Reproduksi
- c. Sosialisasi
- d. Pemeliharaan
- e. Penempatan anak di dalam masyarakat
- f. Pemuas kebutuhan perseorangan
- g. Kontrol sosial



Pentingnya peran keluarga dalam pendidikan karakter

<http://buahhaticerdas.files.wordpress.com>

Dengan fungsi sosial, keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk individu yang bermoral. Namun demikian, dengan pergeseran fungsi keluarga menyebabkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Keluarga tidak lagi menjadi tempat anak untuk bercerita dan berbagai pengalaman. Bahkan ada kecenderungan anak kurang dalam memegang nilai-nilai penting bagi pembentukan moral anak.

Keluarga sebagai basis pendidikan karakter, maka tidak salah kalau krisis karakter yang terjadi di Indonesia sekarang ini bisa dilihat sebagai salah satu cerminan gagalnya pendidikan di keluarga. Korupsi misalnya, bisa dilihat sebagai kegagalan pendidikan untuk menanamkan dan menguatkan nilai kejujuran dalam keluarga. Orangtua membangun kehidupannya di atas tindakan yang korup, akan sangat sulit menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya. Mereka mungkin tidak menyuruh anaknya agar menjadi orang yang tidak jujur, namun mereka cenderung tidak akan melihat sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sebagai salah satu nilai yang sangat penting yang harus dipertahankan mati-matian. Ini mungkin bisa dijadikan satu penjelasan mengapa korupsi di Indonesia mengalami alih generasi. Ada pewarisan sikap permisif terhadap korupsi dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Raka, 2006:5)

“Keluarga adalah komunitas pertama di mana manusia, sejak usia dini, belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah. Dengan kata lain, di keluargalah seseorang, sejak dia sadar lingkungan, belajar tata nilai atau moral. Karena tata nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam karakternya, maka di keluargalah proses pendidikan karakter berawal. Pendidikan di keluarga ini akan menentukan seberapa jauh seorang anak dalam prosesnya menjadi orang yang lebih dewasa, memiliki komitmen terhadap nilai moral tertentu, seperti kejujuran, kedermawanan, kesederhanaan, dan menentukan bagaimana dia melihat dunia di sekitarnya, seperti memandang orang lain yang tidak sama dengan dia – berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda latar belakang budaya. Di keluarga juga seseorang mengembangkan konsep awal mengenai

keberhasilan dalam hidup ini atau pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan hidup berhasil, dan wawasan mengenai masa depan (Raka,2006)”

➤ Peran Sekolah Dalam Pendidikan Karakter

Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru dan dosen adalah figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru merupakan teladan bagi siswa dan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Peran pendidik sebagai pembentuk generasi muda yang berkarakter sesuai UU Guru dan Dosen, UU no 14 tahun 2005, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lebih jauh Slavin (1994) menjelaskan secara umum bahwa performa mengajar guru meliputi aspek kemampuan kognitif, keterampilan profesional dan keterampilan sosial. Di samping itu, Borich (1990) menyebutkan bahwa perilaku mengajar guru yang baik dalam proses belajar-mengajar di kelas dapat ditandai dengan adanya kemampuan penguasaan materi pelajaran, kemampuan penyampaian materi pelajaran, keterampilan pengelolaan kelas, kedisiplinan, antusiasme, kepedulian, dan keramahan, guru terhadap siswa.

Dalam menghadapi tantangan global, guru atau pendidik menjadi agen transformasi. Dalam proses transformasi melalui pendidikan formal di sekolah, guru atau dosen memegang peran yang sangat penting. Menurut Gede Raka, prestasi guru atau dosen dilihat dari keberhasilannya dalam membantu para peserta didik mentransformasikan diri ke tingkat kualitas pribadi yang lebih tinggi atau lebih baik. Hal ini dimaknai bahwa guru dan dosen tidak hanya



Peran sekolah dalam pendidikan karakter
(<http://tiga-tujuh.20fr.com>)

sebagai agen transformasi pada tatanan individu atau peserta didik, namun juga secara bersama-sama dapat berperan sangat besar dalam sebuah transformasi sebuah

masyarakat atau bangsa. Artinya, titik awal dalam transformasi pembentukan karakter bangsa, maka titik awalnya adalah transformasi guru atau transformasi pendidikan.

Sebagai agen transformasi, guru dan dosen diharapkan memahami dan menerapkan sebelas prinsip yang minimal diperlukan dalam pendidikan karakter, yang kemudian disosialisasikan dengan *integrated learning* dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai yang dibutuhkan dalam pendidikan karakter sebaiknya sudah menyatu dalam diri seorang pendidik, hal ini dimaksudkan agar sebagai seorang pendidik memiliki keyakinan baru, bahwa dalam dirinya sangat dituntut untuk benar-benar menjadi orang yang memiliki karakter yang kuat, sehingga dalam proses transformasi kepada anak didik dapat menjadi “model” atau “tauladan” sebagai orang yang memiliki karakter. Ibaratnya pendidik adalah sebuah “lilin”, maka pendidik akan gagal menyalakan “lilin orang lain /anak didik”, artinya : pendidik akan mengalami kesulitan membentuk generasi yang berkarakter, jika pendidik belum menjadi manusia berkarakter juga. Aspek lain yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik adalah tetap mengajarkan nilai-nilai penting yang dibutuhkan dalam proses pendidikan yakni *care* (kasih sayang), *respect* (saling menghormati), *responsible* (bertanggung jawab), *integrity* (integritas), *harmony* (keseimbangan), *resilience* (daya tahan atau tangguh), *creativity* (kreativitas). dll

Profil guru dan dosen transformasional, yakni pendidik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Raka, 2006:2) : Dapat melihat pekerjaan sebagai guru atau dosen sebagai panggilan; Tidak memandang siswa atau mahasiswa sebagai deretan gelas kosong, tetapi bibit-bibit dengan potensi keunggulan yang beragam; Melihat inti dan fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi insani untuk kehidupan yang lebih bermakna; Memandang sekolah sebagai komunitas belajar, bukan mesin; Penuh kepedulian; Apresiatif; Pembelajar prima; Berintegritas

Gambaran tentang kualitas guru atau dosen transformasional bukan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan oleh seorang pendidik. Jika dalam diri pendidik muncul suatu kesadaran yang kuat untuk berkembang menjadi pribadi yang berkarakter kuat yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini dalam menghasilkan generasi yang bermartabat dan berkarakter.

➤ **Peran Masyarakat dan Media Massa Dalam Pendidikan Karakter**

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, salah yang berpengaruh dalam pembangunan atau sebaliknya juga merusak karakter masyarakat atau bangsa

adalah media massa, khususnya media elektronik, dengan pelaku utamanya adalah televisi. Peran media, media cetak dan radio dalam pembangunan karakter bangsa telah dibuktikan secara nyata oleh para pejuang kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, melakukan pendidikan bangsa untuk menguatkan karakter bangsa melalui tulisan-tulisan di surat kabar waktu itu. Bung Karno dan Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan, keberanian dan persatuan melalui radio. Mereka dalam keterbatasannya, memanfaatkan secara cerdas dan arif teknologi yang ada pada saat itu untuk membangun karakter bangsa, terutama sekali: kepercayaan diri bangsa, keberanian, kesediaan berkorban, dan rasa persatuan. Sayangnya kecerdasan dan kearifan yang telah ditunjukkan generasi pejuang kemerdekaan dalam memanfaatkan media massa untuk kepentingan bangsa makin sulit kita temukan sekarang. Sebagaimana dipaparkan oleh Gede Raka:

“Media massa sekarang memakai teknologi yang makin lama makin canggih. Namun tanpa kecerdasan dan kearifan, media massa yang didukung teknologi canggih tersebut justru akan melemahkan atau merusak karakter bangsa. Saya tidak ragu mengatakan, media elektronik di Indonesia, khususnya televisi, sekarang ini kontribusinya ‘nihil’ dalam pembangunan karakter karakter bangsa. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak ada program televisi yang baik. Namun sebagian besar program televisi justru lebih menonjolkan karakter buruk daripada karakter baik. Seringkali pengaruh lingkungan keluarga yang baik justru dirusak oleh siaran media televisi. Di keluarga, anak-anak dididik untuk menghindari kekerasan, namun acara TV justru penuh dengan adegan kekerasan. Di rumah, anak dididik untuk hidup sederhana, namun acara sinetron di televisi Indonesia justru memamerkan kemewahan. Di rumah anak-anak dididik untuk hidup jujur, namun tayangan di televisi Indonesia justru secara tidak langsung menunjukkan ‘kepahlawanan’ tokoh-tokoh yang justru di mata publik dianggap ‘kasar’ atau ‘pangeran-



**Anak belajar kekerasan
lewat acara televisi**
(<http://www.inilah.com>)

pangeran’ koruptor. Para guru agama mengajarkan bahwa membicarakan keburukan orang lain dan bergosip itu tidak baik, namun acara televisi, khususnya infotainment, penuh dengan gosip. Bapak dan ibu guru di sekolah mendidik para murid untuk berperilaku santun, namun suasana sekolah di sinetron Indonesia banyak menonjolkan perilaku yang justru tidak santun dan melecehkan guru. Secara umum, banyak tayangan di televisi Indonesia, justru ‘membongkar’ anjuran

berperilaku baik yang ditanamkan di rumah oleh orang tua dan oleh para guru di sekolah (Raka,2007:4)”

Media massa berperan ganda. Di satu sisi memutarakan iklan-iklan layanan masyarakat atau iklan yang menyentuh hati, di sisi lain menyiarkan acara/sinetron yang justru malah menampilkan hal-hal negatif, yang akhirnya bukannya di jauhi, malah ditiru oleh para penontonnya. Media media harus dikontrol oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk mengontrol segala aktivitas media, agar sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Perangkat hukumnya harus jelas dan adil. Indonesia sendiri mempunyai Depkominfo, tapi hanya sekedar mengatur kebijakan frekuensi, hak siar, dsb. Lebih khusus lagi, ada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), yang dibentuk lebih independen, namun diakui pemerintah. KPI diharapkan dapat memfilter aktivitas media (terutama televisi) agar sesuai dengan tujuan negara, norma, kebudayaan, adat, dan tentunya agama. Namun sampai saat ini, KPI dirasa masih cukup lemah dalam bertindak (memfilter), dan maka daripada itu, sangat dibutuhkan (kekuatan) peran serta masyarakat dalam mengontrol media-media tersebut (Raka,2007)

Dari pengaruh media massa tersebut, maka ke depan perlu dipikirkan kembali fungsi media massa sebagai media edukasi yang memiliki “cultural of power” dalam membangun masyarakat yang berkarakter, karena efek media massa sangat kuat dalam membentuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Prinsip-prinsip dalam pendidikan karakter perlu diinternalisasikan dalam program-program yang ditanyakan oleh media massa, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mengatasi krisis karakter bangsa. Pengelola media massa perlu untuk mengembangkan dirinya sebagai “agen perubahan” yang memiliki jiwa yang berkarakter, sehingga seni dan karya yang dihasilkan dan ditayangkan akan sarat dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanis-religius dan dijauhkan dari tayangan yang merusak moral bangsa, dan “virus-virus” yang melemahkan etos dan budaya kerja .

➤ **Peran Negara dalam Pendidikan Karakter**

Pembangunan karakter tidak hanya idealism, namun memiliki makna dalam membangun kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan karakter pada tataran individu dan tataran masyarakat luas perlu dikuatkan agar bangsa Indonesia

lebih mampu cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Raka,2007:1).

“Karakter yang perlu diperbaiki adalah kedisiplinan. Bangsa Indonesia telah dikenal dengan bangsa dengan jam karet, jika tidak terlambat maka dianggap bukan orang Indonesia. Disiplin nasional perlu digalakkan dengan sungguh-sungguh dalam upaya mewujudkan masyarakat, bangsa, negara yang bercita-cita luhur. Disiplin bertujuan memperbaiki tingkah laku dan moral bagi seluruh manusia yang tinggal di Indonesia, baik bagi kalangan akademisi dan juga para pelaku bisnis di Indonesia.

Pengertian disiplin adalah disiplin kerja, disiplin cara hidup sehat, disiplin berlalu-lintas, sanitasi, pelestarian lingkungan. Disiplin nasional berhasil jika individu melaksanakan disiplin tersebut dengan kesungguhan hati dan memahami bahwa disiplin diri merupakan cikal bakal untuk disiplin nasional. Dengan demikian, dengan adanya pendidikan karakter, budaya dan moral bukan hanya generasi yang telah menjadi guru, tetapi juga setiap anak, pemuda, dan orang dewasa yang ada di Indonesia dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Melalui pendidikan karakter, pendidikan budaya, dan pendidikan moral akan menghasilkan watak dan manusia Indonesia yang seutuhnya. Di satu sisi, pihak pemerintah berusaha dengan gigih untuk memberikan teladan bagi warga masyarakat” (Raka,2007:3)

Negara memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pendidikan karakter, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip sudah ditetapkan baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. .

Kekuatan untuk menjalankan amanah UU sangat ditentukan oleh kekuatan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pembangunan karakter bangsa ini ditentukan oleh perilaku penegak hukum sebagai penjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tujuan kesejahteraan, keadilan masyarakat, ketentraman masyarakat. Oleh karena, para penegak hukum haruslah dipegang oleh orang-orang yang berkarakter kuat, demikian juga para elite politik, birokrat, teknokrat yang menjadi menjalankan semua amanah UUD 45 pun haruslah orang-orang terpilih karena memiliki karakter yang kuat dan tangguh sebagai

pemimpin rakyat. Sehingga kedudukan mereka benar-benar kuat sebagai “ pejuang bangsa” yang selalu ingin membawa bangsa ini pada kemajuan dan kesejahteraan.

DISKUSI KELOMPOK
“Problem-solving”

1. Dengan diagram “mengapa-mengapa”, jelaskan 2 sebab pokok terjadinya krisis di Indonesia?
2. Dengan diagram “bagaimana-bagaimana”, jelaskan solusi terhadap masalah krisis tersebut?

F. KESIMPULAN

Nilai mempunyai peran peting dalam kehidupan manusia. Nilai adalah sumber kekuatasn dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial. Norma sebagai patokan perilaku manusia mengalami perubahan makna , namun demkian secara moral tetap menjadi landasan bagi perilaku manusia

Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius . Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Nilai, norma dan hukum serta moral adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukkan karakter manusia. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan moral,

Pendidikan karakter dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual tidak mudah diterapkan jika tidak didukung oleh semua warga masyarakat yang pada setiap tataran kehidupan masyarakat. Keluarga, sekolah dan masyarakat serta negara perlu menyadari bahwa membangun pendidikan karakter harus menjadi kebutuhan bersama sehingga bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis karakter yang sudah bersifat dimensional dan struktural.